

STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TETAP TERJAGA DI TENGAH MENINGKATNYA DINAMIKA PEREKONOMIAN

“Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga, di tengah tantangan perekonomian global dan domestik”

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global



Pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan dengan inflasi di beberapa negara maju mulai menunjukkan tren penurunan.



Volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik yang terus berkembang. Upaya penyelesaian konflik Ukraina dan Rusia belum menemukan titik terang dan rencana penerapan tarif baru AS terhadap negara mitra dagang juga meningkatkan ketidakpastian.



Amerika Serikat

- Pertumbuhan ekonomi tetap solid dengan aktivitas ekonomi didukung oleh konsumsi domestik.
- Inflasi berada di level 3% yoy pada Januari 2025 dan core CPI naik ke 3,3% yoy menunjukkan bahwa tekanan harga di luar sektor energi dan pangan masih cukup tinggi.
- Pasar tenaga kerja tetap kuat dengan tingkat pengangguran turun ke 4%, meski angka peningkatan *Nonfarm Payroll* jauh lebih rendah dari ekspektasi pasar.
- Kebijakan moneter cenderung netral, dengan The Fed diperkirakan hanya akan memangkas *Fed Fund Rate* (FFR) 1 hingga 2 kali di tahun 2025.



Tiongkok

- Pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan dengan CPI tercatat masih rendah sebesar 0,5% yoy, dan indeks harga produsen (PPI) terus mengalami kontraksi. PMI masih di zona ekspansi namun turun menjadi sebesar 50,1, di bawah ekspektasi pasar.
- Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan, menunjukkan pendekatan hati-hati dalam pelonggaran moneter.
- Pengetatan regulasi ekspor *rare earth* yang dapat berdampak pada industri teknologi global.

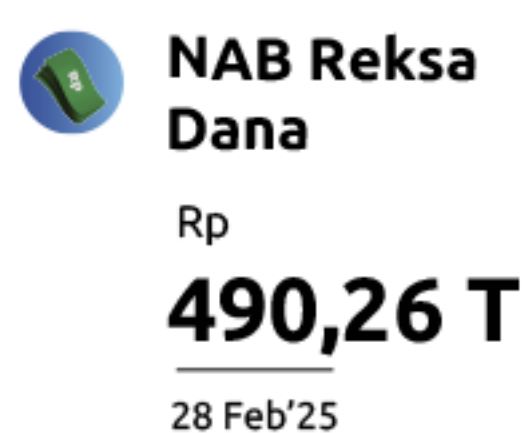
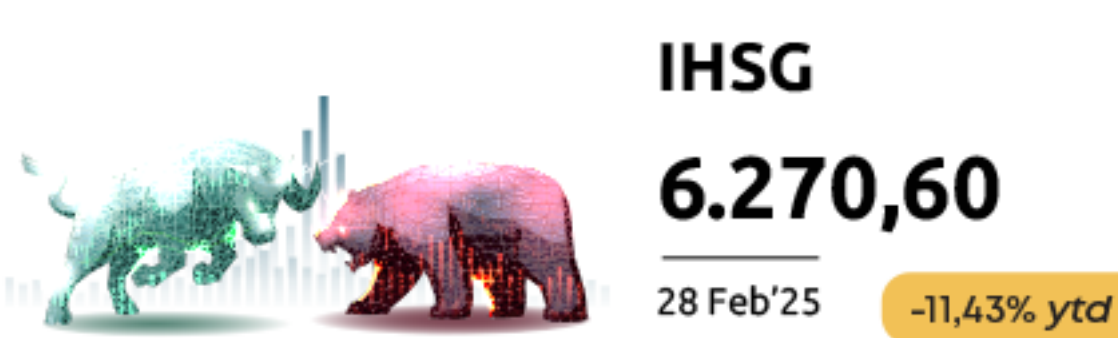
Domestik

- Inflasi cukup terkendali dengan inflasi Januari tercatat 0,76% yoy, dan inflasi inti sebesar 2,26% yoy yang menunjukkan permintaan domestik masih cukup baik.
- Perlu dicermati indikator permintaan domestik lainnya, di antaranya berlanjutnya penurunan penjualan kendaraan baik motor dan mobil, penurunan penjualan semen, serta perlambatan pertumbuhan harga dan penurunan volume penjualan rumah.
- PMI Manufaktur pada Januari 2025 naik ke level 51,9 dari sebelumnya 51,2.
- Surplus neraca perdagangan terus berlangsung, pada Januari 2025 meningkat ke USD 3,45 miliar (Des-24: USD 2,24 miliar), tumbuh sebesar 71,71% yoy.



PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)



Securities Crowdfunding

29 November 2024

18 penyelenggara berizin OJK

Rp 1,43 Triliun total dana yang dihimpun

759 penerbit efek

176.119 pemodal



Perdagangan Karbon

26 September 2023 s.d 29 November 2024

Rp77,25 miliar Akumulasi Nilai Perdagangan

1.578.443 tCO2e Volume Unit

110 pengguna jasa yang mendapatkan izin



PERBANKAN (PBKN)

Kredit

Des'24 **Rp7.827 T**

Jan'24 **Rp7.058 T**

Jan'25 **Rp7.782 T**

10,27% yoy

Dana Pihak Ketiga

Des'24 **Rp8.837 T**

Jan'24 **Rp8.415 T**

Jan'25 **Rp8.879 T**

5,51% yoy

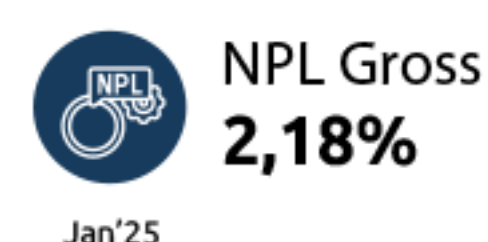
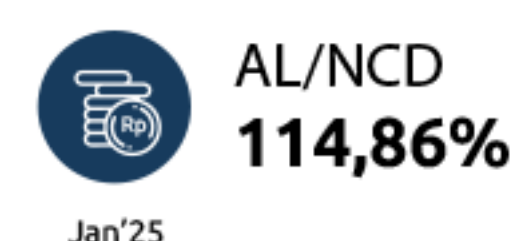
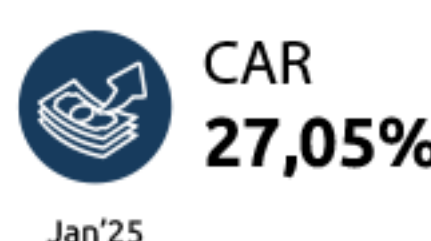
Kredit Investasi



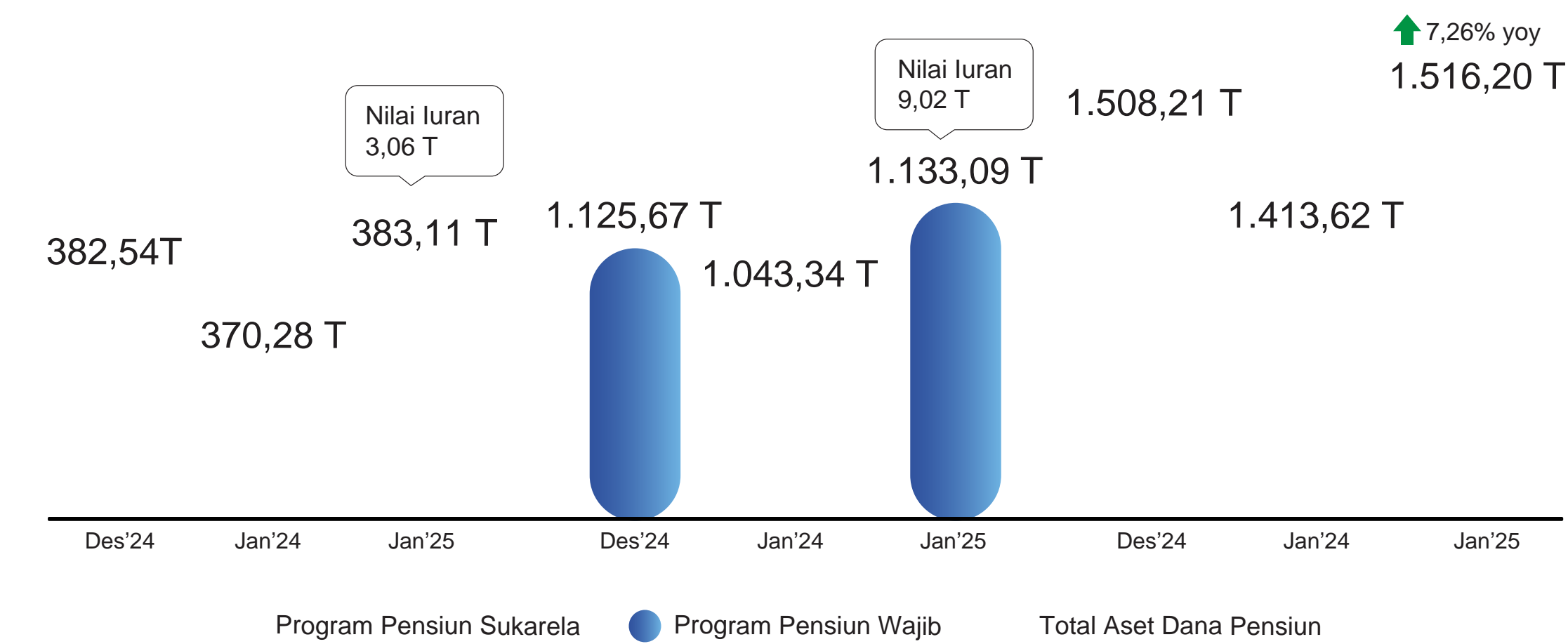
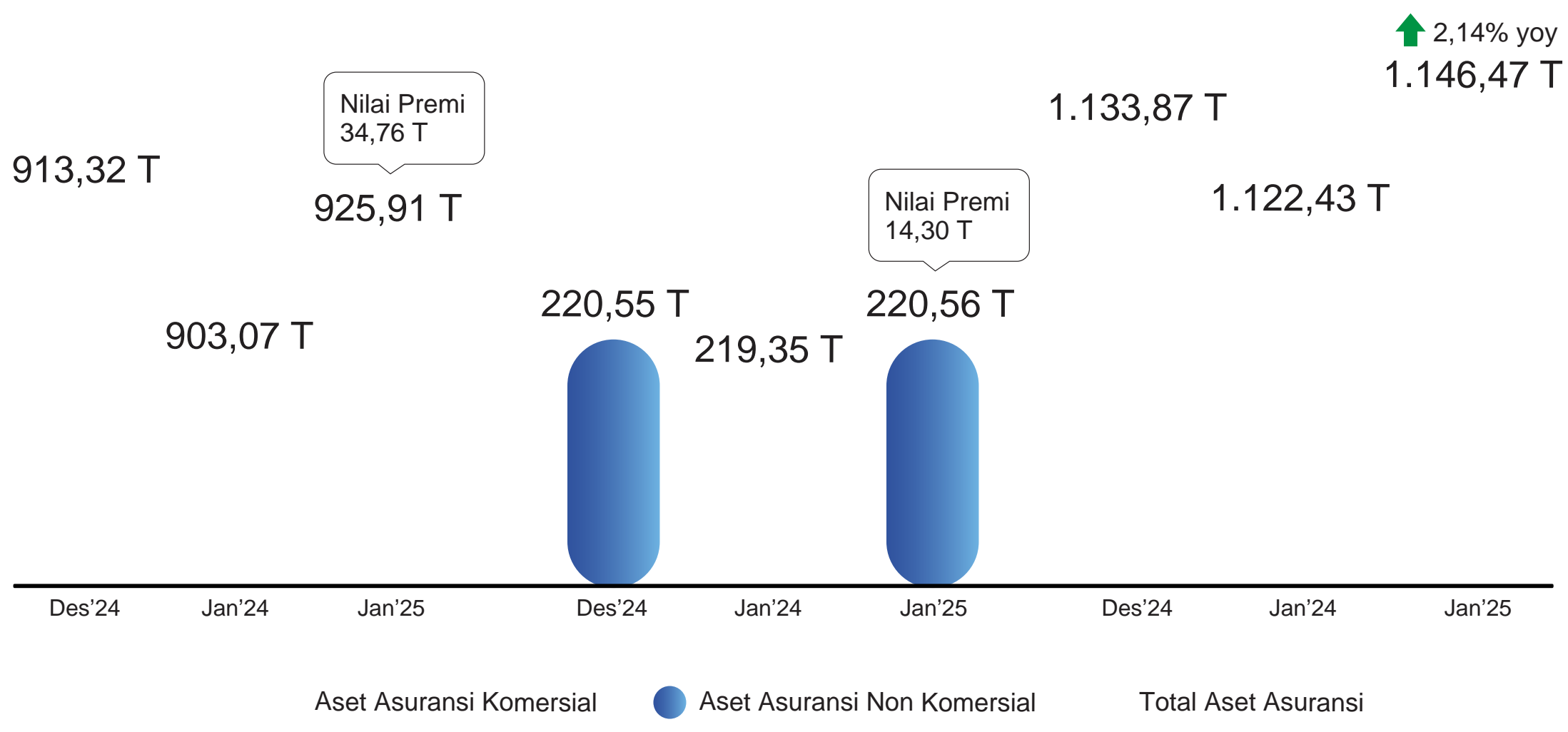
Kredit Modal Kerja



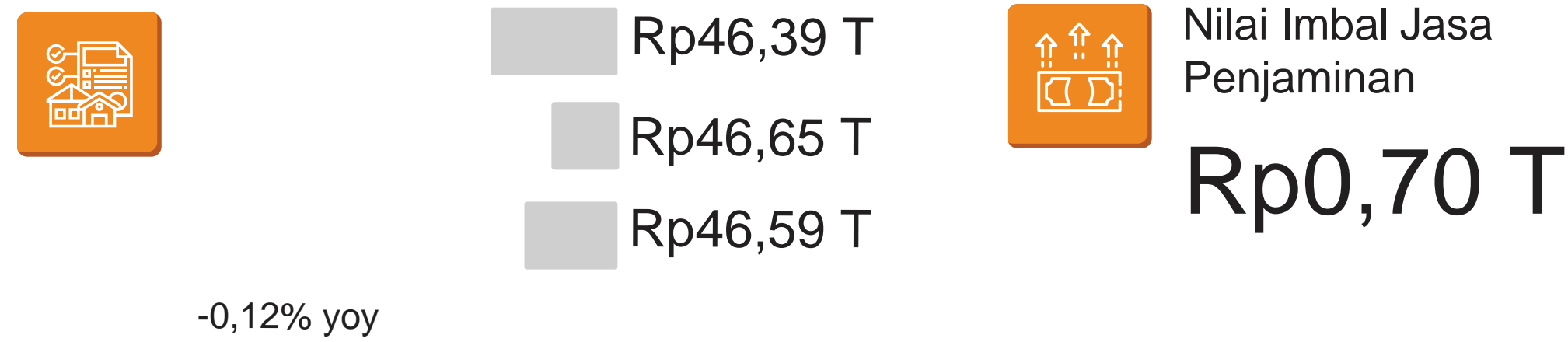
Kredit Konsumsi



PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN
 ' \$ 1 \$ 3 (1 6 , 8 1 Ó 3 3 ' 3 Ó



Aset Perusahaan Penjaminan



RBC Asuransi Jiwa

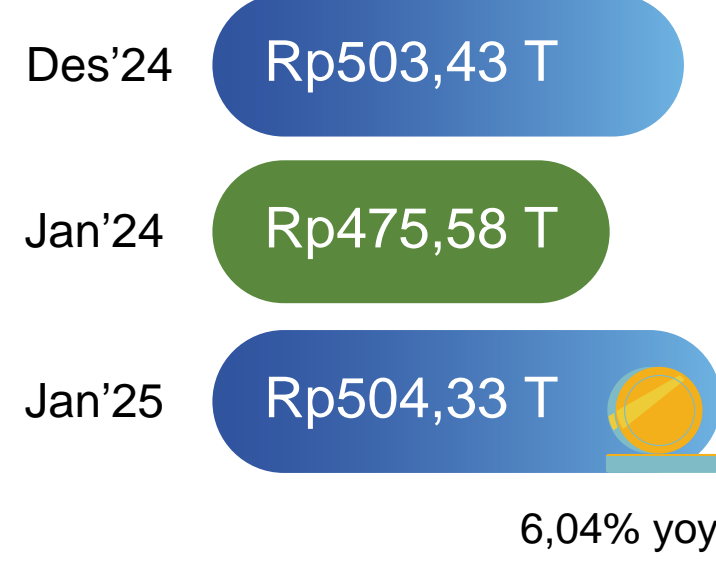
448,18%

RBC Asuransi Umum dan Reasuransi

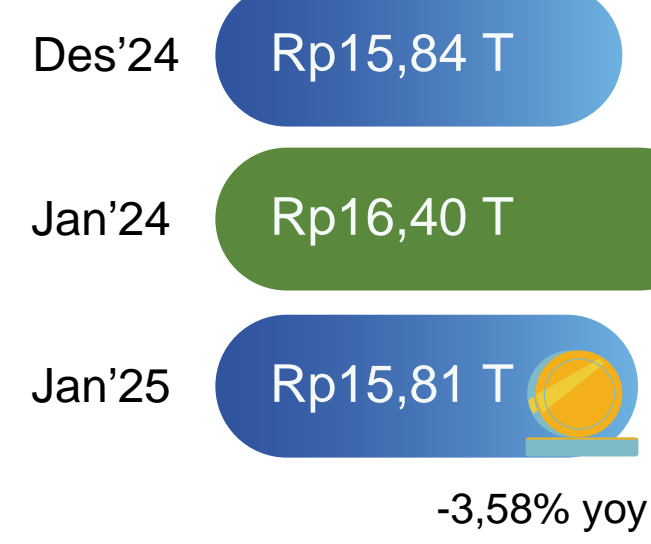
317,77%

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA PVML

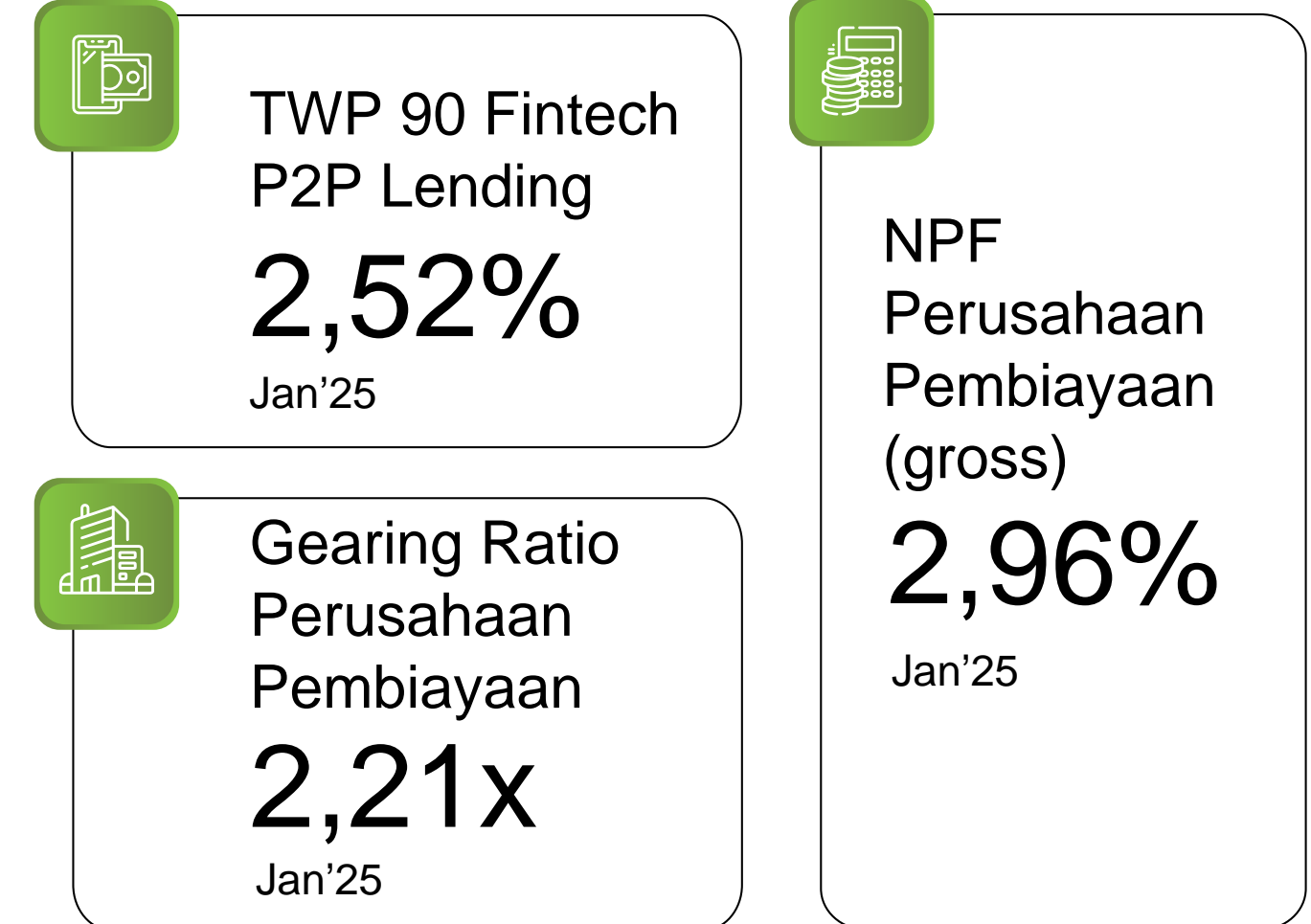
Piutang Pembiayaan



Pembiayaan Modal Ventura



Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending

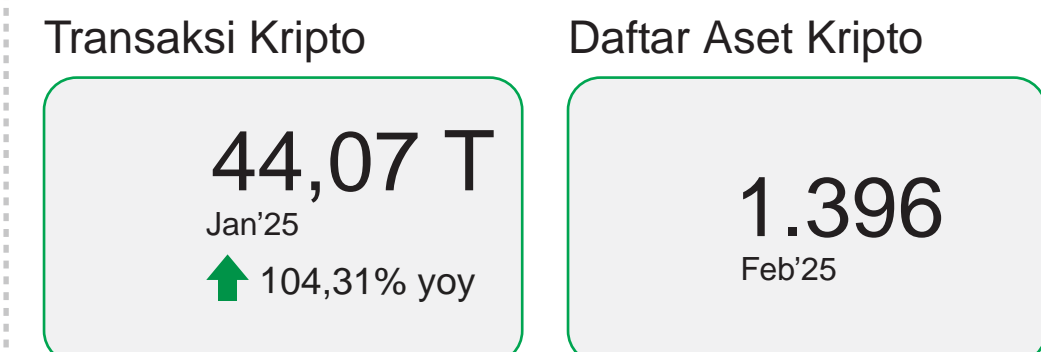


INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO IAKD

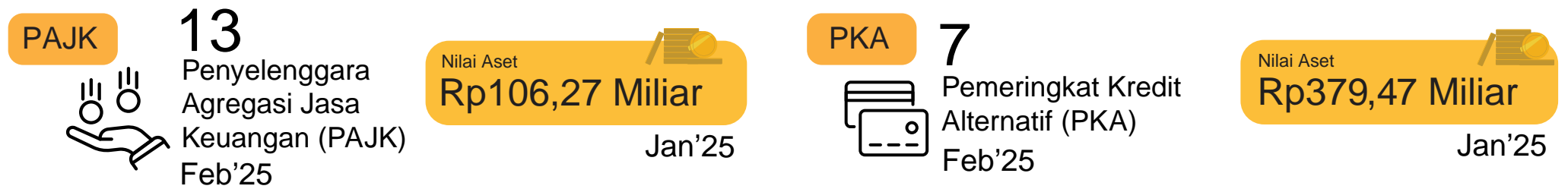
Regulatory Sandbox Februari 2025



Aset Kripto



Penyelenggara ITSK

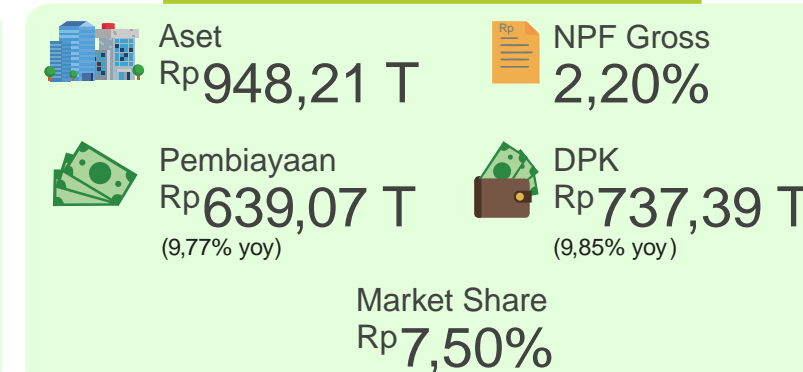


SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasar Modal Syariah Feb 2025



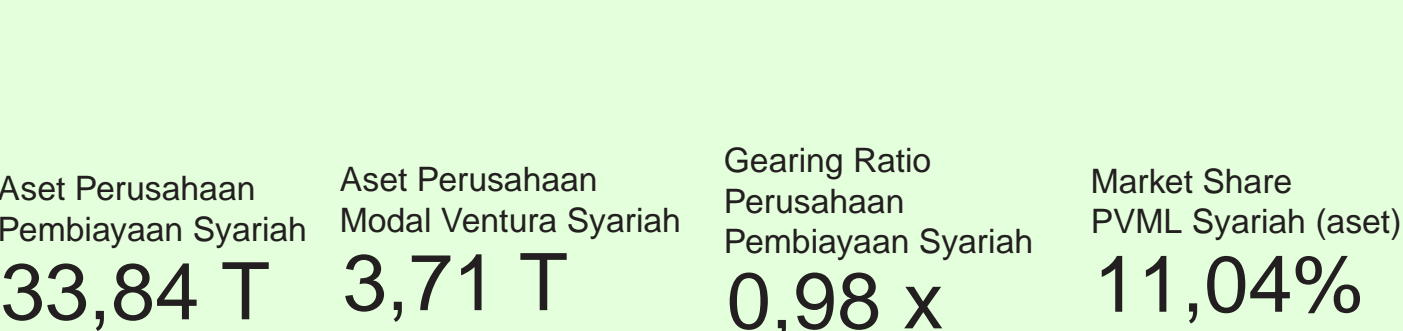
Perbankan Syariah Jan 2025



PPDP Syariah Jan 2025



PVML Syariah Des 2024

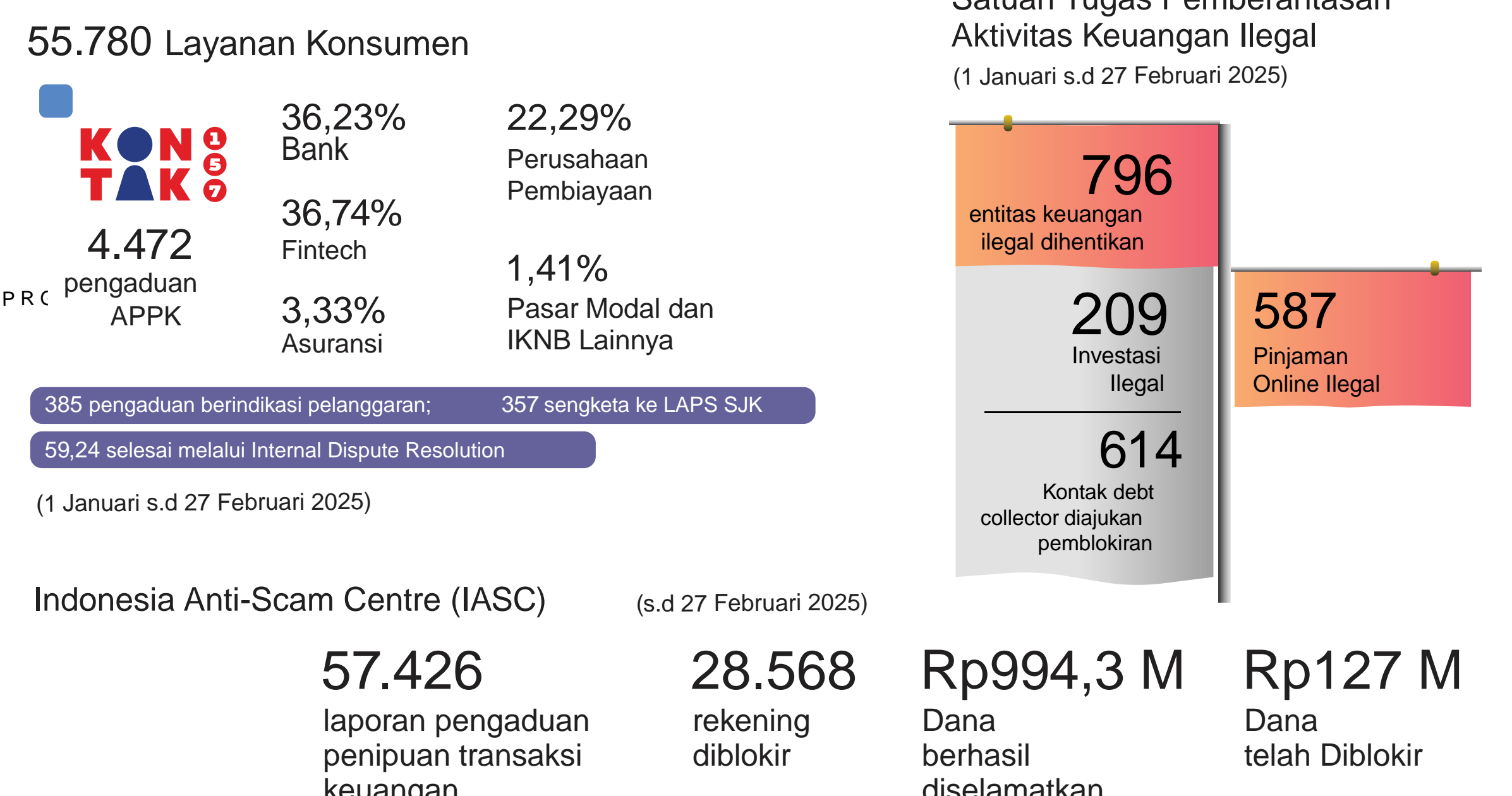


PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN PEPK

Program Literasi dan Edukasi Keuangan (1 Januari s.d 27 Februari 2025)



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (1 Januari 2025 s.d 10 Februari 2025)



Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- Dukungan terhadap kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yaitu OJK telah menyampaikan kepada industri perbankan dan LPEI, terutama terkait aspek prudensial. OJK juga meminta agar bank memastikan kelengkapan dokumen dalam hal akan menggunakan DHE SDA. DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan dalam POJK; bagian penyediaan dana yang dijamin agunan tunai berupa dana DHE SDA yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK/BMPD/BMPP; bagian dari kredit/pembiayaan yang dijamin dengan dana DHE SDA tersebut dan memenuhi
- Menyikapi perkembangan terkini Pasar Modal, OJK bersama SRO menyelenggarakan Dialog dan Konferensi Pers Bersama Pelaku Pasar Modal. Mempertimbangkan kondisi pasar terkini serta untuk menjaga stabilitas di Pasar Modal dan tetap memperhatikan perlindungan investor, OJK akan terus melakukan monitoring atas perkembangan pasar. Sebagai langkah awal, OJK akan menunda implementasi kegiatan *short-sell* saham. Selain hal tersebut, terdapat opsi kebijakan lain yang akan dikaji antara lain pelaksanaan *buyback* saham tanpa RUPS, namun dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi

Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

- Menyetujui kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai tindak lanjut Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (POJK 17/2024). Izin kegiatan usaha bulion tersebut dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia dan diharapkan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
- Menetapkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
 - POJK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Efek, dalam rangka mendukung transisi pengaturan derivatif keuangan dengan underlying Efek dari Bappebti ke OJK.
 - POJK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah.
 - POJK Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan, yang merupakan tindak lanjut UU P2SK.
- Dalam tahap penyusunan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
 - RPOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
 - RPOJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi serta RPOJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.
 - RSEOJK tentang Asuransi Kesehatan, yang akan memperkuat tata kelola penyelenggaraan asuransi kesehatan.
 - Amandemen RSEOJK tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech).
 - RPOJK tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan/PAJK.
 - RPOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama dan Penilaian Kembali Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
 - RSEOJK tentang Pelaporan Penyelenggara ITSK yang Memiliki Izin Usaha di OJK.
 - Kajian dan Pedoman Keamanan Siber untuk Pedagang Aset Keuangan Digital.
- Memperkuat pengawasan dan perlindungan investor pasar modal, diantaranya melalui aplikasi OJK OSIDA PMDK (Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon) yang memanfaatkan *Big Data Analytics* Pasar Modal.
- Meningkatkan kapasitas dan keahlian Tim Penilai Calon Pihak Utama di industri PVML dan terus menyempurnakan proses bisnis penilaian kemampuan dan kepatutan dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi, sebagaimana ditekankan pada PVML *Fit and Proper Test Assessor Summit 2025*.

Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- Pada tahun 2025 direncanakan 18 UUS melakukan *spin off* dan 8 UUS akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi yang telah ada.
- Dalam rangka penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah telah diselenggarakan pembukaan GERAK Syariah (Gebyar Ramadan Keuangan Syariah) dan SYAFIF (*Syariah Financial Fair*).

Penguatan Tata Kelola OJK

- Pelaksanaan forum Rapat Kerja Pengawasan Internal untuk meningkatkan internalisasi penerapan *combined assurance* dan *three lines model*, serta adopsi kerangka kerja internasional yang merujuk pada *Global Internal Audit Standard* (GIAS).
- Dalam upaya mendorong terwujudnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya di butir ke-7 terkait upaya pemberantasan korupsi dan meminimalkan potensi *fraud*, OJK terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan *Governansi Insight Forum* (In Fo), *Student Integrity Campaign* (In Camp), dan webinar.
- Melakukan fasilitasi *benchmarking share function* dan menginisiasi pelaksanaan *sharing session* mengundang konsultan independen bertaraf internasional untuk mengetahui secara konseptual proses perencanaan, tahapan, dan persiapan pelaksanaan *share function*.
- Mengadakan pelatihan *Quality Control* dan *Quality Assurance* (QCQA) melalui kerja sama dengan BPK RI.
- Menerima kunjungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk mendiskusikan praktik terbaik dalam pengendalian gratifikasi.

Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 28 Februari 2025:



141

Perkara Selesai

115

perkara Perbankan

5

perkara PMDK

20

perkara PPDP

1

perkara PVML



121

Putusan Pengadilan

110

in Kracht

2

banding

9

kasasi